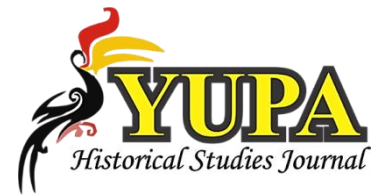


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 6 No. 1, 2022 (76-89)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



## Sejarah Pembangunan Pertanian di Kabupaten Deli Serdang pada masa Orde Baru (1968-1998)

Putri Khairani<sup>1</sup>, Suprayitno<sup>2</sup>, Warjio<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>1</sup>putrikhairani999@gmail.com, <sup>2</sup>nisanaceh@gmail.com, <sup>3</sup>warjio1974@gmail.com

Received	Accepted	Published
13/07/2022	03/08/2022	10/08/2022

**Abstract** This article aims to explain the history of agriculture in Deli Serdang Regency during the New Order era (1968-1998). This article uses a historical research method with four steps, namely: source collection, source criticism, interpretation, and historiography. There are two sources of data in this study, namely: primary sources, in the form of archives, reports, and records from the National Archives of the Republic of Indonesia, the Department of Agriculture, North Sumatra Province and Deli Serdang Regency; secondary sources, in the form of books, journals, and other periodicals in the National Library, Central Library of the University of North Sumatra, Regional Libraries, and so on. The results showed that before the New Order era, Deli Serdang had become a granary for North Sumatra. This is due to the soil and geographical conditions of Deli Serdang which are very supportive of the agricultural system. In addition, through the Repelita 1-6 program initiated by the New Order Government, agriculture in Deli Serdang Regency is growing. The construction of training centers and agricultural nurseries in Deli Serdang Regency also contributed to the reason that Deli Serdang is still the center of rice granaries in North Sumatra.

**Keywords:** Agricultural history, The new order, Deli Serdang Regency.

**Abstrak** Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah pertanian di Kabupaten Deli Serdang pada masa Orde Baru (1968-1998). Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat langkah, yaitu: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: sumber primer, berupa arsip, laporan, dan catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Departemen Pertanian Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang; sumber sekunder, berupa buku, jurnal, dan terbitan berkala lainnya yang ada di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum masa Orde Baru Deli Serdang sudah menjadi lumbung padi bagi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan geografis Deli Serdang yang sangat mendukung dengan sistem pertanian. Selain itu, lewat program Repelita 1-6 yang digagas Pemerintahan Orde Baru, menjadikan pertanian di Kabupaten Deli Serdang semakin berkembang. Pembangunan pusat pelatihan dan pembibitan pertanian di Kabupaten Deli Serdang juga ikut memberikan andil yang menyebabkan Deli Serdang sampai saat ini masih menjadi pusat lumbung padi di Sumatera Utara.

**Kata kunci:** Sejarah pertanian, Orde Baru, Kabupaten Deli Serdang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Orde Baru dikenal sebagai era Pembangunan Nasional yang berupaya untuk memperbaiki tatanan ekonomi, sosial, dan politik pasca krisis dan tragedi yang membuat Indonesia mengalami kekacauan pada masa tersebut. Pembangunan Nasional sebagai misi utama pemerintahan Orde Baru memiliki tiga ciri utama dalam penerapan kebijakan tersebut, yaitu: pembangunan, pertanian dan industrialisasi, serta integrasi politik Indonesia (Rahardjo, 1993, p. 322). Kebijakan pertanian merupakan kebijakan utama yang dilakukan oleh Soeharto sebagai upaya dalam memulihkan keadaan ekonomi pada masa pemerintahannya. Kebijakan dalam bidang pertanian ini kemudian terkenal dengan nama “Revolusi Hijau”.

Istilah Revolusi Hijau merujuk pada situasi pertanian yang menunjukkan peningkatan produksi tanaman terutama jenis padi-padian di banyak negara berkembang. Revolusi hijau bertujuan untuk memperbaiki produktivitas pertanian yang pada awalnya menggunakan metode seperti pestisida, perbaikan irigasi, dan peralatan pertanian yang lebih baik. Revolusi Hijau merupakan kebijakan yang berpijak pada lahan pertanian yang tidak bertambah, sementara laju pertumbuhan penduduk terus bertambah, sehingga kebutuhan pangan mengalami defisit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan produksi pertanian dilakukan empat usaha pokok yang meliputi; intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diservikasi pertanian dan rehabilitasi pertanian (Las, 2009).

Revolusi Hijau menjadi proyek penelitian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian terutama pangan di berbagai negara di dunia. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan dengan disponsori oleh lembaga *Ford and Rockefeller Foundation*. Perubahan yang disebut revolusi itu dimulai dari Meksiko yang mengubah sistem pertaniannya secara radikal pada tahun 1945. Salah satu alasannya karena berbanding terbaliknya pertambahan jumlah penduduk dengan kapasitas produksi gandum. Hasilnya yaitu delapan tahun kemudian Meksiko dapat mengekspor gandum. Setelah Meksiko berhasil meningkatkan produksi gandum, kemudian didirikan badan penelitian IRRI (*International Rice Research Institute*) di Filipina yang menghasilkan varietas padi baru dengan hasil produksi yang lebih tinggi dibanding varietas padi lokal di Asia (Hartanto, 2021, p. 217).

Kebijakan Revolusi Hijau di Indonesia dimulai ketika pemerintahan Orde Baru mendirikan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk melakukan penyuluhan demi mendukung upaya peningkatan produksi pada sektor pertanian. Lembaga-lembaga yang didirikan pada masa tersebut ialah Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Instruksi Massal). Lembaga-lembaga ini berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan hasil 2,5 % pertahun menjadi 6% pertahun dalam kurun waktu hanya 6 tahun, yaitu pada tahun 1965-1971. Pada tahun 1973 areal lahan intensifikasi pertanian mencapai 4,2 juta Ha (56% dari areal persawahan di Indonesia) atau 73% areal pesawahan di pulau Jawa. Kondisi ini berdampak kepada penentu

kebijakan pada saat itu Presiden Soeharto di mana pada tanggal 10 April 1972 memberi peringatan kepada Departemen Pertanian agar target pada Repelita I sebanyak 15,7 juta ton ditinjau kembali (Geertz, 2016, pp. 21–22).

Keseriusan pemerintahan Orde Baru dalam membangun dan memajukan sektor pertanian pada masa tersebut ditindaklanjuti dengan memasukkan pembangunan sektor pertanian pada Repelita I (1969-1974). Tujuan umum peningkatan sektor pertanian pada rancangan tersebut ialah: menaikkan produksi pangan khususnya beras, meningkatkan produksi pertanian, diversifikasi tanaman ekspor, memperluas kesempatan kerja, dan puncaknya agalah swasembada beras pada akhir program Repelita tersebut. Program-program yang telah disebutkan di atas juga berlaku di Provinsi Sumatera Utara termasuk wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan pertanian di Sumatera Utara, salah satu wilayah bahkan yang paling berhasil selama program Revolusi Hijau yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru adalah wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Deli Serdang sendiri ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1984 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1965. Hari jadi Kabupaten Deli Serdang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Kemudian sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Deli Serdang dimekarkan lagi menjadi dua wilayah yakni: Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan, 14 Kelurahan, dan 380 Desa (Sinar, 1987).

Sebelum pemerintahan Orde Baru, wilayah Kabupaten Deli Serdang telah dibangun proyek pembangunan pertanian seperti proyek persawahan di Desa Rantau Panjang pada periode sebelum kemerdekaan. Lalu dibangun kembali proyek persawahan di Perbaungan. Pemerintah kemudian mendatangkan petani-petani Banjar dari Kalimantan agar dapat membangun swasembada beras di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Selain Perbaungan dan Rantau Panjang, pemerintah juga membangun areal persawahan dengan sistem irigasi yang sama di daerah hulu Serdang di lembah Sungai Buaya (Sinar, 1987, p. 119).

Hasil dan data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pertanian di Sumatera Utara khususnya Deli Serdang. Pembangunan pertanian di Deli Serdang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada Trilogi Pembangunan. Penelusuran pembangunan pertanian di Deli Serdang pada Orde Baru terjadi pada Pelita I hingga Pelita VI (Suwondo, 1983, p. 39). Hal ini dapat dilihat dalam fokus pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya. Pembangunan Kabupaten Deli Serdang berfokus pada pembangunan di bidang

ekonomi dengan titik berat pada prioritas pembangunan pertanian serta sarana dan prasarana yang mendukungnya. Keberhasilan pembangunan pertanian merupakan sinergi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sebagai bahan perbandingan dan rujukan terkait dengan tema penelitian yang diangkat. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu: (1) tesis berjudul "*Pembangunan Pertanian di Simalungun, 1966-1998*", tesis ini juga berfokus pada sejarah dan pembangunan pertanian pada masa Orde Baru, namun mengambil lingkup spasial di Kabupaten Simalungun yang membedakannya dengan penelitian ini (Hartanto, 2020); (2) skripsi berjudul "*Dampak Pelaksanaan Repelita IV Terhadap Ekonomi Masyarakat Petani Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Morawa pada Masa Orde Baru*", penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi yang dirasakan oleh para petani di Kecamatan Tanjung Morawa pada masa Orde Baru (Simanjuntuk, 2017). Walaupun memiliki lingkup temporal yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, namun fokus masalah yang diangkat berbeda; (3) Skripsi berjudul "*Suku Banjar di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 1985-2005*", penelitian ini berfokus pada peran dari masyarakat etnik Banjar yang berjasa besar dalam perkembangan pembangunan pertanian di wilayah Deli Serdang. Perihal ini juga penulis singgung di dalam penelitian ini, namun penulis berfokus pada pembangunan pertaniannya, bukan pada peran etnik tersebut (Rizky, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis sebutkan di atas, posisi penting Kabupaten Deli Serdang dalam sektor pertanian belum mendapatkan perhatian serius, khususnya dalam bidang sejarah. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya penelitian yang membahas terkait sejarah pertanian di wilayah ini. Padahal sejak masa kolonial Deli Serdang sudah memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Oleh sebab itu, artikel ini hadir untuk memberikan informasi baru terkait sejarah pertanian, khususnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Selain itu penelitian ini juga hadir untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan sejarah pertanian di Sumatera Utara.

## **METODE**

Dalam penulisannya penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dalam empat langkah, yaitu: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1986, p. 22). Penelitian ini berfokus pada sejarah pembangunan pertanian pada masa Orde Baru (1968-1998) di Kabupaten Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu: *pertama*, sumber tertulis primer yakni arsip-arsip yang terdapat di ANRI; *kedua*, sumber tertulis sekunder yakni buku-buku, koran, terbitan berkala, artikel, dan sebagainya. Sumber tertulis primer didapatkan di ANRI antara lain sebagian besar tersimpan di khazanah Inventaris Arsip Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 1950-2009 yang di dalamnya terdapat beberapa bundel arsip seperti: surat-surat atau laporan tentang pangan, laporan

departemen pertanian, arsip penelitian benih, laporan rapat produksi pangan, dan lainnya. Sementara untuk sumber tertulis sekunder penulis temukan di beberapa perpustakaan seperti: Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Perpustakaan Kabupaten Deli Serdang, dan melakukan kunjungan ke Biro Pusat Statistik Republik Indonesia di Jakarta, Medan serta Lubuk Pakam.

Setelah semua sumber terkumpul, penulis kemudian mengerjakan tahapan kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber. Dalam tahapan ini terdapat dua jenis kritik yakni kritik internal yakni kritik terhadap isi sumber tersebut dan kritik eksternal yakni kritik terhadap sumber-sumber tersebut apakah perlu digunakan atau tidak. Sumber primer dan sekunder yang tidak berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan sejarah pertanian di Kabupaten Deli Sering pada periode 1968-1998 tidak penulis jadikan sebagai sumber di dalam penelitian ini. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi yaitu memuat analisis dan sintesis terhadap sumber yang telah dikritik. Dalam tahapan ini penulis melakukan penafsiran terhadap dua sumber di penelitian ini (primer dan sekunder) yang bisa digunakan untuk mencari sejarah pertanian di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 1968-1998. Tahapan ini juga penulis gunakan agar penulis terhindar dari bias subyektifitas. Tahapan terakhir dari metode ini adalah historiografi atau penulisan. Pada tahap ini penulis kemudian menyajikan tulisan secara sistematis dan kronologis terkait sejarah pertanian di Kabupaten Deli Serdang tahun 1968-1998.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Pertanian di Deli Serdang dari Masa ke Masa**

Pada masa kolonial Kabupaten Deli Serdang hari ini menjadi wilayah kekuasaan dari dua kesultanan besar yang ada di Sumatera Timur, yaitu: Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang (Sinar, 1971, p. 43). Kedua kesultanan ini memiliki teritorinya tersendiri yang saat ini sebagian besar menjadi Kabupaten Deli Serdang. Dalam catatan John Anderson, penduduk Sumatera Timur termasuk Deli dan Serdang sudah mengenal sistem pertanian. Pada umumnya penduduk Sumatera Timur menerapkan sistem pertanian yang membuka lahan atau hutan yang memiliki tanah kurang produktif (*bahuma*) (Anderson, 1971).

Cara bertani seperti itu juga dipraktikkan oleh penduduk yang berada di Deli dan Serdang dengan cara membuka rawa-rawa yang berada di pinggir sungai dan membuat beberapa petak sawah untuk ditanami padi. Selain itu penduduk yang tinggal di hulu Deli dan Serdang membuka lahan padi dengan menebang pohon dan membuat petak-petak kecil dengan hanya mengandalkan hujan yang mampu berproduksi selama 15-20 tahun sebelum membuka lahan yang baru. Selain padi, penduduk Deli dan Serdang juga telah membudidayakan tanaman lada. Pertanian lada biasanya dilakukan oleh orang-orang Karo yang bermigrasi ke pesisir atau membuka lahan di wilayah hulu Deli dan Serdang untuk membudidayakan tanaman lada (Perret, 2010, p. 129).

Namun Kesultanan Serdang memiliki kebijakan yang sedikit berbeda dengan Kesultanan Deli terkait dengan kebijakan pada bidang pertanian. Kesultanan Serdang di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Shariful Alamsyah memberi perhatian khusus terkait lahan pertanian milik masyarakat dan kesultanan. Sultan tidak memberi izin semua tanah di wilayahnya kepada perusahaan-perusahaan asing yang hendak membuka perkebunan di wilayah ini. Karena sebagian lahan tersebut hendak dijadikan sebagai lahan pertanian.

Awal pelaksanaan penanaman padi di Kesultanan Serdang masih menggunakan sistem *berhuma*. Dalam tradisi ini dikenal istilah *ditugal*, yakni bibit padi ditanam dalam lubang tugal yang telah dipersiapkan. Alat *menugal* adalah sebatang kayu bulat yang ujungnya telah diruncingkan untuk membuat lubang. Kemudian dalam pemeliharaannya agar tumbuh subur, penduduk Serdang merumput, yakni membersihkan rumput atau gulma yang tumbuh liar di tanaman padi, serta menyisip. Begitupun hasil yang diperoleh dari sistem *berhuma* ini tidak memberikan hasil yang optimal, untuk meningkatkan produksi yang lebih banyak maka memerlukan lahan yang lebih luas lagi (Pelzer, 1985, p. 80).

Ketika jumlah penduduk di Kesultanan Serdang semakin bertambah, hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan akan makanan pokok, salah satunya beras. Kondisi ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Sultan Sulaiman. Hal ini kemudian menyebabkan sultan memerintahkan untuk mengembangkan sistem pertanian yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat Kesultanan Serdang. Pada awalnya sultan menginginkan sistem pertanian *berhuma* diganti dengan sistem menetap yang jauh lebih intensif dan berkelanjutan.

Langkah awal dalam merealisasikan kebijakan ini ialah dengan memanfaatkan rawa-rawa yang berada di Rantau Panjang yang digenangi banyak air. Pada tahun 1892 M, Sultan Sulaiman memulai sebuah "Revolusi Pertanian" di wilayah Kesultanan Serdang (Pelly, 1986). Dana sebesar 10.000 gulden disiapkan oleh Sultan Sulaiman untuk mengubah daerah rawa-rawa tersebut menjadi persawahan. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut gagal total biarpun sudah menelan biaya yang cukup besar. Penyebab kegagalan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang handal untuk mengelola irigasi dan sistem pengendalian banjir (Ratna, Hamdani, Murni, & Afkar, 2015, p. 62).

Kegagalan program ini tidak serta merta membuat Sultan Sulaiman berhenti berinovasi dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1903 M, Sultan Sulaiman mendatangkan orang-orang Banjar ke Serdang untuk mengelolah sawah-sawah di wilayah ini untuk meningkatkan hasil pertanian. Alasan lain sultan mendatangkan orang-orang Banjar ini agar masyarakat Serdang banyak belajar dari mereka perihal bercocok tanam dan pengolahan sawah. Kedatangan petani Banjar ini bersamaan dengan penghulu mereka bernama Haji Mas Demang. Penghulu ini menjadi pimpinan dan orang kepercayaan Sultan Sulaiman dalam memimpin program pertanian yang dicetuskan olehnya. Selain itu, tujuan Sultan

Sulaiman menggunakan orang-orang Banjar dalam mengolah sawah di Serdang untuk memadukan sistem pertanian khas Banjar dengan sistem irigasi (*subak*) dari orang-orang Bali yang tinggal di wilayah Serdang (Azhari, Pakpahan, Tanjung, Faridah, & Abdurrahman, 2013, p. 67).

Sementara itu di Kesultanan Deli juga dilakukan program peningkatan pertanian yang diprakarsai Dinas Kehutanan Hindia-Belanda yang meminta kepada Residen Sumatera Timur untuk menyediakan areal persawahan seluas 10.800 hektar dan 5.300 hektar untuk areal cadangan. Areal yang diminta oleh pejabat tersebut terletak di Kampung Sisir Gunting yang berada sebelah barat laut Pelabuhan Belawan. Kemudian Residen Sumatera Timur menyetujui gagasan tersebut dan menyediakan areal yang luanya 3000 hektar yang dianggap cocok untuk membudidayakan padi (Pelzer, 1985, p. 143).

Program pembukaan kampung dan areal persawahan di Sisir Gunting mengalami keberhasilan. Hal inilah kemudian menjadi pemicu munculnya perkampungan-perkampungan serupa yang sekaligus mengelola persawahan padi. Pada tahun 1920, penduduk yang bermukim di Sisir Gunting mencapai 500 keluarga. Karena keberhasilan ini, kemudian pemerintah memberikan anggaran dana sebesar 8.000 gulden untuk membuka areal perkampungan dan persawahan yang dapat menampung 500 keluarga. Keberhasilan program ini kemudian menjadikan Kesultanan Deli sebagai lumbung padi di Sumatera Timur (Pelzer, 1985, p. 144).

Sementara Kesultanan Deli mengembangkan proyek areal persawahan di Sisir Gunting, Kesultanan Serdang juga mengembangkan areal persawahan ini di Kampung Percut. Awalnya daerah ini merupakan wilayah konsesi perkebunan tembakau, namun karena tidak menguntungkan wilayah ini dihibahkan oleh pihak perkebunan kepada warga sekitar. Masyarakat sekitar yang kebanyakan berasal dari etnik Jawa kemudian banyak menetap di daerah sekitar Sungai Percut, Sungai Tuan, Sungai Merah, Saentis, dan Sampali. Masyarakat di wilayah ini bergotong royong dalam membangun lahan persawahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Melihat kemajuan ini, pemerintah Hindia-Belanda kemudian membangun saluran-saluran air yang dialiri dari Sungai Percut (Pelzer, 1985, p. 146).

Setelah ditetapkan sebagai wilayah pertanian padi, penduduk di Percut kemudian diberikan masing-masing lahan seluas  $\pm$  1 hektar. Pada tahun 1930 M, saluran air yang diambil dari Sungai Percut selesai dibangun. Saluran air ini kemudian dapat mengaliri 160 hektar lahan persawahan di Percut dan dikelola kurang lebih oleh 65 keluarga. Sistem persawahan mengikuti sistem yang telah diterapkan di Jawa, hal ini dilakukan agar memudahkan untuk memanen padi dengan menggunakan alat penyiangan buatan Jepang. Sama seperti halnya dengan Sisir Gunting, proyek persawahan di Percut juga mengalami kemunduran pasca terjadinya Perang Dunia ke-II.

Setelah Indonesia merdeka, program untuk menguatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan dilanjutkan oleh pemerintah Orde Lama. Hal fundamental yang dilakukan

oleh pemerintah Orde Lama adalah dengan memperluas areal pertanian dan meningkatkan produksi pangan. Program tersebut kemudian dikenal dengan nama "Rencana Kasimo" (*Kasimo Plan*). Program ini dicetuskan oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat Ignatius Joseph Kasimo H pada tahun 1948 (Adryamarthanino, 2021). Program ini memiliki desain rancangan yang bagus, namun belum bisa direalisasikan secara maksimal karena gejolak politik pada masa itu. Salah satu program Kasimo untuk Sumatera Utara termasuk Deli Serdang adalah menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur (terutama wilayah Langkat, Deli dan Serdang) seluas 281.277 hektar (Kisworo, 2017, p. 76).

Gagalnya program *Kasimo Plan* akibat gejolak politik, menyebabkan pemerintahan Orde Lama juga mencoba untuk mengambil kebijakan lainnya dalam menangani masalah ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah merancang program Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) yang melingkupi program: pembangunan balai benih, perbaikan dan perluasan pengairan lahan, dan memanfaatkan fasilitas pertanian yang dibangun pada masa kolonial. Program ini juga berlaku di Sumatera Utara termasuk Deli Serdang, di bawah pengawasan Dinas Jawatan Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Utara. Di Deli Serdang sendiri, program ini direalisasikan dengan memperbaiki kembali fasilitas pertanian, saluran irigasi, serta membangun pusat penelitian balai benih yang berada di Ibu Kota Kabupaten, yaitu Lubuk Pakam (Pelzer, 1985, p. 149). Pada masa ini juga banyak dilakukan program-program lainnya dalam mendukung dan menguatkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia, di antaranya: Plan Wisaksono, Rencana Intensifikasi Padi, dan Demonstrasi Massal (DEMAS) yang menjadi cikal-bakal program Bimbingan Masal pada masa Orde Baru (Basuki, 2010, pp. 46-48).

Melalui serangkaian upaya peningkatan produksi padi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, produksi beras terus meningkat setiap tahunnya. Walaupun produksi padi terus meningkat, namun dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, peningkatan produksi padi yang cenderung stabil ternyata tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan beras. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produksi padi perkapita pada tahun 1960 sampai dengan 1968 yang menurun 0,22 persen per tahunnya.

Sedangkan 11 tahun sebelumnya antara tahun 1950-1960 dengan pertumbuhan produksi padi yang cukup besar yaitu 3,91 persen pertahun dan penambahan jumlah penduduk yang lebih besar dari periode sesudahnya yaitu 2,14 per tahun, produksi padi perkapita ternyata menunjukkan peningkatan sebesar 1,78 persen per tahun. Dengan demikian, untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk yang terus menerus, diperlukan adanya kebijakan peningkatan produksi pangan yang sangat signifikan dan lebih besar dari pertumbuhan jumlah penduduk itu sendiri. Angka-angka tersebut juga termasuk sumbangan swasembada beras dari wilayah Deli Serdang (Basuki, 2010, p. 49).



## Sejarah Pertanian di Kabupaten Deli Serdang pada masa Orde Baru

Program Repelita 1-6 pada masa Orde Baru memang memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi dan pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan wilayah-wilayah di daerah sebagai lumbung padi pertanian dalam rangka menguatkan sektor ketahanan pangan nasional (Hartanto, 2020, pp. 73-74). Dalam merealisasikan program tersebut harus terjadi sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengeluarkan Keppres No. 15 Tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Struktur dan tingkatan badan ini menurun dari mulai daerah tingkat I yaitu Provinsi dan daerah tingkat II yaitu kabupaten/kota.

Pada masa ini lewat program Pelita 1-6, pemerintahan Orde Baru terus membangun dan menguatkan sektor ketahanan pangan nasional lewat Departemen Pertanian. Selain lembaga ini, juga terdapat beberapa lembaga lainnya yang didirikan oleh pemerintahan Orde Baru dengan tujuan untuk mendukung program yang tercantum dalam Keppres No. 15 Tahun 1974, yaitu:

- Badan Urusan Logistik (Bulog) dibentuk pada 1967 dengan tugas utama melakukan stabilisasi penyediaan dan harga beras domestik.
- Badan Pengendali Bimbingan Massal (BP Bimas) merupakan lembaga setingkat eselon I di bawah Departemen Pertanian, yang tugas pokoknya menggerakkan masyarakat petani dalam meningkatkan produksi padi.
- Badan Benih Nasional yang dibentuk pada 1971 merupakan lembaga non-struktural di bawah koordinasi Menteri Pertanian yang mempunyai tugas utama dalam peningkatan penyediaan dan distribusi benih padi varietas unggul dengan potensi hasil yang tinggi (Suryana, 2008, p. 7).

Program Repelita 1-6 pada masa Orde Baru berkonsentrasi pada peningkatan produksi padi, hal ini juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Program-program turunan dari pusat yang dilakukan oleh Pemprov di antaranya: intensifikasi dan ekstensifikasi penanaman padi, intensifikasi penggunaan tanah, perangsang produksi dan penyuluhan serta penelitian. Sementara itu pembangunan pertanian di Kabupaten Deli Serdang memang perlu ditingkatkan melihat produksi padi di wilayah Deli Serdang tertinggi dibandingkan pada kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumatera Utara sebelum masa Orde Baru. Berikut penulis sajikan tabel 1 tentang hasil produksi padi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1960.

NO	Kabupaten/Kota	Produksi Padi (dalam Ton)
1	Langkat	42.000
2	Deli Serdang	129.570
3	Karo	28.000
4	Simalungun	51.800
5	Asahan	50.050
6	Labuhan Batu	9.250
7	Tapanuli Utara	92.820
8	Tapanuli Selatan	80.850
9	Tapanuli Tengah	11.900
10	Dairi	10.880
11	Nias	1.400

**Tabel 1:** Hasil produksi padi pada tahun 1960 di kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara  
*Sumber: Almanak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1969*

Perkembangan program Pelita di Kabupaten Deli Serdang menyebabkan banyak penduduk di wilayah ini yang ikut terpengaruh untuk mengembangkan program tersebut. Perkembangan pertanian, terutama pada komoditi padi memberikan pengaruh yang cukup luas bagi perkembangan wilayah ini. Alasannya adalah sektor pertanian sudah lama menjadi penghasil utama masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Sehingga dengan adanya program ini menjadikan perkembangan pertanian ikut memberikan andil dalam kemajuan kabupaten ini. Perkembangan lahan pertanian juga berdampak dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Deli Serdang.

Perkembangan pertanian di Kabupaten Deli Serdang mulai terasa intensif sejak program Pelita I yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru bersinergi dengan pemerintah daerah. Perkembangan tersebut dapat dicapai karena adanya perkembangan serta meningkatnya daya hasil pertanian di wilayah tersebut. Sejak Pelita I dan Pelita II tahun ke-4 (1978), bidang pertanian atau irigasi di Kabupaten Deli Serdang mengalami kemajuan yang begitu nyata, kemajuan-kemajuan tersebut di antaranya adalah:

- Daya hasil areal lahan pertanian yang bertambah
- Peningkatan mutu sarana pengairan
- Penyebaran sarana produksi yang bertambah dan merata di desa-desa
- Penyebaran atau pemakaian bibit unggul, pupuk, dan pestisida
- Cara bercocok tanam yang baik
- Pengolahan tanah yang baik (Sjoerkani, 1978, p. 273).

Selain Pelita I-VI, di Kabupaten Deli Serdang juga dilaksanakan program Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) sebagai upaya peningkatan produksi pertanian dengan menerapkan formula atau gagasan Panca Usaha Tani. Hal ini didasarkan pada Keppres No. 95 tahun 1969 tentang Bimbingan Massal (Bimas), dilakukan usaha Intensifikasi Massal untuk peningkatan produksi pertanian pada masa tanam 1969 hingga 1979. Hal ini dilakukan di

berbagai pusat-pusat produksi padi di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Balai Benih Pertanian di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Program Bimbingan Massal dalam proyek anggaran di Sumatera Utara pada 1977/1978 meliputi 12 kabupaten, 155 kecamatan dan 2812 desa. Pembinaan wilayah atau areal intensifikasi meliputi bidang pertanian padi, palawija, dan sayur-sayuran. Bidang pertanian padi mencakup areal seluas 357.209 ha; bidang pertanian palawija seluas 46.049 ha; dan bidang sayur-sayuran mencakup wilayah seluas 9.545 ha. Seluruh areal proyek intensifikasi pertanian adalah 412.803 ha. Adapun tenaga pelaksana yang ditugaskan dalam proyek ini tahun 1977/1978 sejumlah 563 orang. Tenaga pelaksana ini terdiri dari penyuluh pertanian spesialis berjumlah 20 orang dan penyuluh pertanian lapangan berjumlah 543 orang (*Inventaris Arsip Kementerian Pertanian RI (1950-2009) No. 38, 2018*).

Perluasan pertanian demi peningkatan hasil produktivitas padi juga terjadi dalam sejarah pertanian di Kabupaten Deli Serdang. Pada 1974, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program dengan penyediaan 30 ton bibit padi jenis IR-26 yang didistribusikan ke berbagai wilayah Bimas di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Deli Serdang. Program penyediaan bibit ini memang secara terus menerus diperkenalkan agar petani menanam bibit unggul tersebut di sawah-sawah mereka.

Pada 1967, penggunaan bibit varietas unggul PB-5 dan PB-8 di Kabupaten Deli Serdang menggunakan lahan seluas 22.100 ha. Daerah yang dijadikan lahan penanaman varietas unggul tersebut sebagian besar berada di Tanjung Morawa dan Perbaungan. Sejak 1977, luas lahan pertanian di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sejumlah 25,92 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Deli Serdang yang digunakan sebagai lahan pertanian (Sjoerkani, 1978, p. 273).

Peningkatan produksi padi setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kebutuhan padi belum terpenuhi hingga tahun 1971. Pada 1967 untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara mengalami kekurangan hasil produksi padi. Hal ini berakibat pada tahun tersebut harus dilakukan impor beras dari luar daerah maupun luar negeri. Di Kabupaten Deli Serdang, peningkatan produksi padi terjadi sejak tahun 1969. Terjadinya peningkatan tersebut dimulai sejak teralisasinya program Pelita I hingga tahun 1977, bahkan pada 1971 produksi pada di Kabupaten Deli Serdang mengalami surplus produksi (Sjoerkani, 1978, p. 278).

Tahun	Kebutuhan Padi (Ton)	Produksi Padi (Ton)
1969	294.695	275.024
1970	316.486	272.121
1971	331.467	350.218
1972	342.642	419.640
1973	352.283	462.550
1974	391.953	407.669
1975	405.563	474.298
1976	420.164	503.560
1977	435.290	540.124

**Tabel 2:** produksi dan kebutuhan makanan pokok di Kabupaten Deli Serdang, 1969-1977  
Sumber: buku "*Sumatera Utara Membangun II*", hal. 278

Secara umum, pelaksanaan proyek pembangunan pertanian pangan di Sumatera Utara khususnya di Deli Serdang bukanlah tanpa hambatan. Pada tahun anggaran 1978/1979, realisasi anggaran terlambat sehingga pelaksanaan proyek terlambat dimulai. Penyebabnya di antaranya adalah perincian pembiayaan kegiatan terlambat direalisasi, penerimaan bibit atau benih palawija terlambat dari pusat untuk pengerjaan proyek percobaan palawija, dan pengunduran jadwal tanam beberapa kegiatan percobaan dan perbenihan karena adanya perbaikan irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (*Inventaris Arsip Kementerian Pertanian RI (1950-2009) No. 637, 2018*)

## KESIMPULAN

Sejak masa sebelum kemerdekaan, Kabupaten Deli Serdang sudah menjadi lumbung pertanian di Sumatera Utara. Bahkan Kabupaten Deli Serdang juga sering dijadikan sebagai daerah pusat penelitian dan pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan Sumatera Utara. Pada masa Orde Baru, lewat beberapa program seperti: Repelita I-VI, Bimas, Inmas, dan perluasan pertanian menjadi faktor meningkatnya produktivitas pertanian di Kabupaten Deli Serdang. Sampai hari ini, berbagai program dan fasilitas pertanian tersebut masih digunakan di Ibukota Kabupaten Deli Serdang, yaitu Lubuk Pakam.

## REFERENSI

- Adryamarthanino, V. (2021, September 2). Kasimo Plan, Upaya Menyelesaikan Masalah Pangan Indonesia. Retrieved April 17, 2022, from kompas.com website: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/02/130000779/kasimo-plan-upaya-menyelesaikan-masalah-pangan-indonesia?page=all>
- Anderson, J. (1971). *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*. Singapore: Oxford University Press.
- Azhari, I., Pakpahan, R., Tanjung, M., Faridah, & Abdurrahman, M. K. (2013). *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Shariful Alamsyah*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Basuki, T. E. H. (2010). *Satu Dasawarsa Kelembagaan Ketahanan Pangan di Indonesia (1999-2009)*. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan.
- Geertz, C. (2016). *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hartanto, D. (2020). *Pembangunan Pertanian di Simalungun, 1966-1998*. Universitas Sumatera Utara.
- Hartanto, D. (2021). Pembangunan Pertanian di Kabupaten Simalungun Pada Masa Orde Baru. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 216-224. <https://doi.org/10.30743/MUKADIMAH.V5I2.4080>
- Inventaris Arsip Kementerian Pertanian RI (1950-2009) No. 38*. (2018). Jakarta.
- Inventaris Arsip Kementerian Pertanian RI (1950-2009) No. 637*. (2018). Jakarta.
- Kisworo, K. S. P. (2017). *Nasionalisme IJ Kasimo pada Zaman Kolonial*. Universtas Sanata Dharma.
- Las, I. (2009). Revolusi Hijau Lestari untuk Ketahanan Pangan ke Depan. *Sinar Tani*.
- Pelly, U. (1986). *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang*. Jakarta: Departemen P & K.
- Pelzer, K. J. (1985). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947* (J. Rumbo, Trans.). Jakarta: Sinar Harapan.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: KPG.
- Rahardjo, M. D. (1993). *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Ratna, N. K., Hamdani, N., Murni, D., & Afkar, I. (2015). *Pengentas Dari Serdang: Biografi Sultan Sualaiman Shariful Alamshah*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Press.
- Rizky, A. F. (2021). *Suku Banjar di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 1985-2005*. Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntuk, E. (2017). *Dampak Pelaksanaan Repelita IV Terhadap Ekonomi Masyarakat Petani Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Morawa pada Masa Orde Baru*. Universitas Negeri Medan.
- Sinar, T. L. (1971). *Sari Sedjarah Serdang (Dengan Adat Istiadat Melaju dan Terombah Seri Padoka Godjah Pahlawan)*. Medan: Yayasan Luckman Sinar.
- Sinar, T. L. (1987). *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang*. Deli Serdang: Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- Sjoerkani. (1978). *Sumatera Utara Membangun II*. Medan: Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
- Suryana, A. (2008). Menelusik Ketahanan Pangan, Kebijakan Pangan, dan Swasembada Beras.

*Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian, 1(1).*

Suwondo, B. (1983). *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Daerah Sumatra Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.